

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,
PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(Studi Empiris Pada BPKAD Kabupaten Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

SUKMA PURBANINGRUM

NIM. 4321125

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,
PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(Studi Empiris Pada BPKAD Kabupaten Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

SUKMA PURBANINGRUM

NIM. 4321125

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma Purbaningrum

NIM : 4321125

Judul Skripsi : **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada BPKAD Kabupaten Pemalang)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pemalang, 20 Mei 2025

Yang menyatakan,



Sukma Purbaningrum

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Sukma Purbaningrum

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : **Sukma Purbaningrum**

NIM : **4321125**

Judul Skripsi : **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada BPKAD Kabupaten Pematang Siantar)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Mei 2025
Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M. Ag
NIP. 19691227 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan naskah skripsi saudara/i:

Nama : **Sukma Purbaningrum**
NIM : **4321125**
Judul Skripsi : **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada BPKAD Kabupaten Pemasang)**
Dosen Pembimbing : **Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag.**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji

Penguji I

Agus Arwani, M.Ag.

NIP. 19760807 201412 1 002

Penguji II

Aditya Agung Nugraha, M.E.

NIP. 19900811 201903 1 008

Pekalongan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. AM. Muh Khafidz Ma'shum, M.Ag.

NIP. 19780616 200312 1 003

MOTTO

“Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.”

QS. As-Syuara : 62

“Tidak ada yang bisa menarikku keluar dari keraguan dan suara-suara yang meremehkan, kecuali keberanian yang kutemukan sendiri di tengah gelapnya ketidakpastian.”

Sukma Purbaningrum

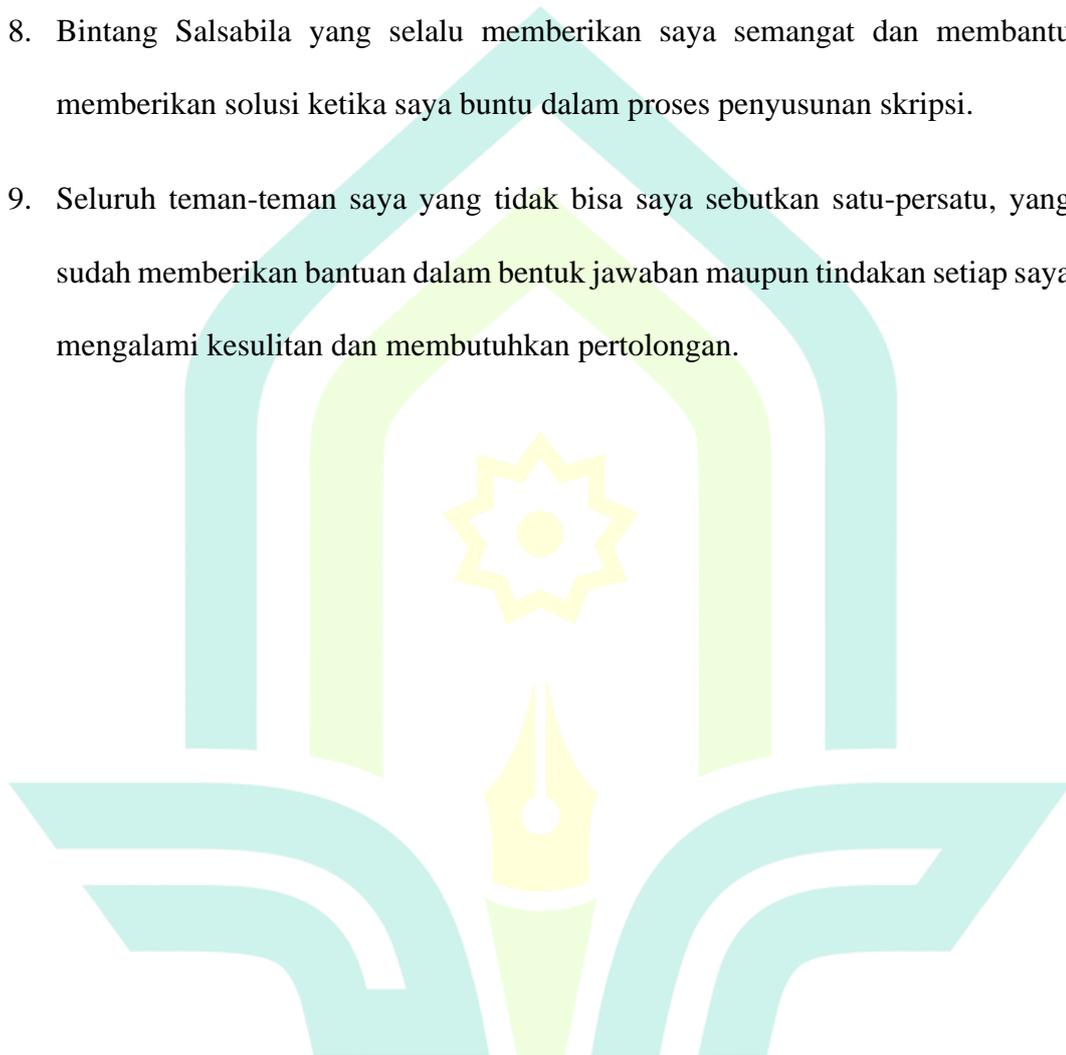


PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga Karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tetap dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Diri saya sendiri yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan S-1 saya di tahun ini dengan kemudahan berkat doa dan segala bentuk dukungan dari orang tua dan para pihak yang akan saya sebutkan setelah ini.
2. Kedua orang tua saya Ibu Sirwati dan Bapak Mundori yang selalu memberi dukungan dan kepercayaan kepada saya untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin, serta segala bentuk perjuangan dan pengorbanan yang selalu menyertai saya.
3. Kakak saya, Panji Bayu Anggoro yang selalu memberi saya kepercayaan dan dukungan kepada saya untuk meneruskan bangku pendidikan saya.
4. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing saya dengan ilmu dan wejangan yang sangat berharga untuk saya.

6. Seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang yang sudah meluangkan waktu berharganya untuk membantu proses penelitian skripsi saya.
7. Teman terdekat saya, Isna, Putri, dan Sheren yang selalu memberi dukungan dalam segala hal dan kebersamai saya selama sewindu lebih.
8. Bintang Salsabila yang selalu memberikan saya semangat dan membantu memberikan solusi ketika saya buntu dalam proses penyusunan skripsi.
9. Seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang sudah memberikan bantuan dalam bentuk jawaban maupun tindakan setiap saya mengalami kesulitan dan membutuhkan pertolongan.



ABSTRAK

Purbaningrum. Sukma. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada BPKAD Kabupaten Pematang)

Pemerintah harus memiliki akuntabilitas atas kinerja agar pemerintahan yang baik dapat tercapai. Akuntabilitas kinerja yang baik adalah kondisi di mana instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka secara transparan, objektif, dan sesuai dengan mandat yang diberikan. Dalam melangsungkan tanggung jawab harus mengutamakan kejelasan sasaran anggaran sebagai awal dari perencanaan, ketika sedang melaksanakan program penting untuk memperhatikan pengendalian akuntansi, dan menyampaikan hasil kinerja melalui sistem pelaporan yang baik agar dapat diketahui publik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Fokus penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pematang, sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah 41 pegawai. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di BPKAD Kabupaten Pematang.

Kata Kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRACT

Purbaningrum, Sukma. The Influence of Budget Goal Clarity, Accounting Control, and Reporting System on the Performance Accountability of Government Agencies (An Empirical Study at BPKAD of Pematang Regency)

The government must uphold accountability in its performance to achieve good governance. Strong performance accountability refers to the ability of government institutions to account for their work results in a transparent, objective manner, and in accordance with the mandates given. In fulfilling this responsibility, it is essential to prioritize budget goal clarity at the planning stage, ensure proper accounting control during program implementation, and communicate performance outcomes through a reliable reporting system accessible to the public. This study aims to examine the influence of budget goal clarity, accounting control, and reporting system on the performance accountability of government agencies. The focus of this research is the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Pematang Regency, which plays a significant role in managing regional finances.

This study uses a quantitative approach with a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to 41 employees. The data analysis technique used is multiple linear regression with the assistance of SPSS version 26.

The results indicate that budget goal clarity, accounting control, and reporting system, both partially and simultaneously, have a positive and significant effect on the performance accountability of government agencies at BPKAD Pematang Regency.

Keywords: *Budget Goal Clarity, Accounting Control, Reporting System, Performance Accountability of Government Agencies*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Syariah Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, tidaklah mudah bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. AM. Muh Khafidz Ma'shum, M.Ag., selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ade Gunawan, M.M., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Ria Anisastus Sholihah, M.S.A. selaku sekretaris program studi Akuntansi Syariah UIN K.H Abduraahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Wilda Yulia Rusyida, M.Sc. selaku wali dosen akademik program studi program studi Akuntansi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

6. Bapak Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Para pegawai BPKAD Kabupaten Pematang yang telah membantu proses penelitian skripsi saya.
9. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu.
10. Semua teman-teman saya yang selalu memberikan bantuan ketika saya kesulitan dan macet dalam menyusun skripsi atas satu dan lain sebab.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun saya berharap dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Pekalongan, 26 Mei 2025

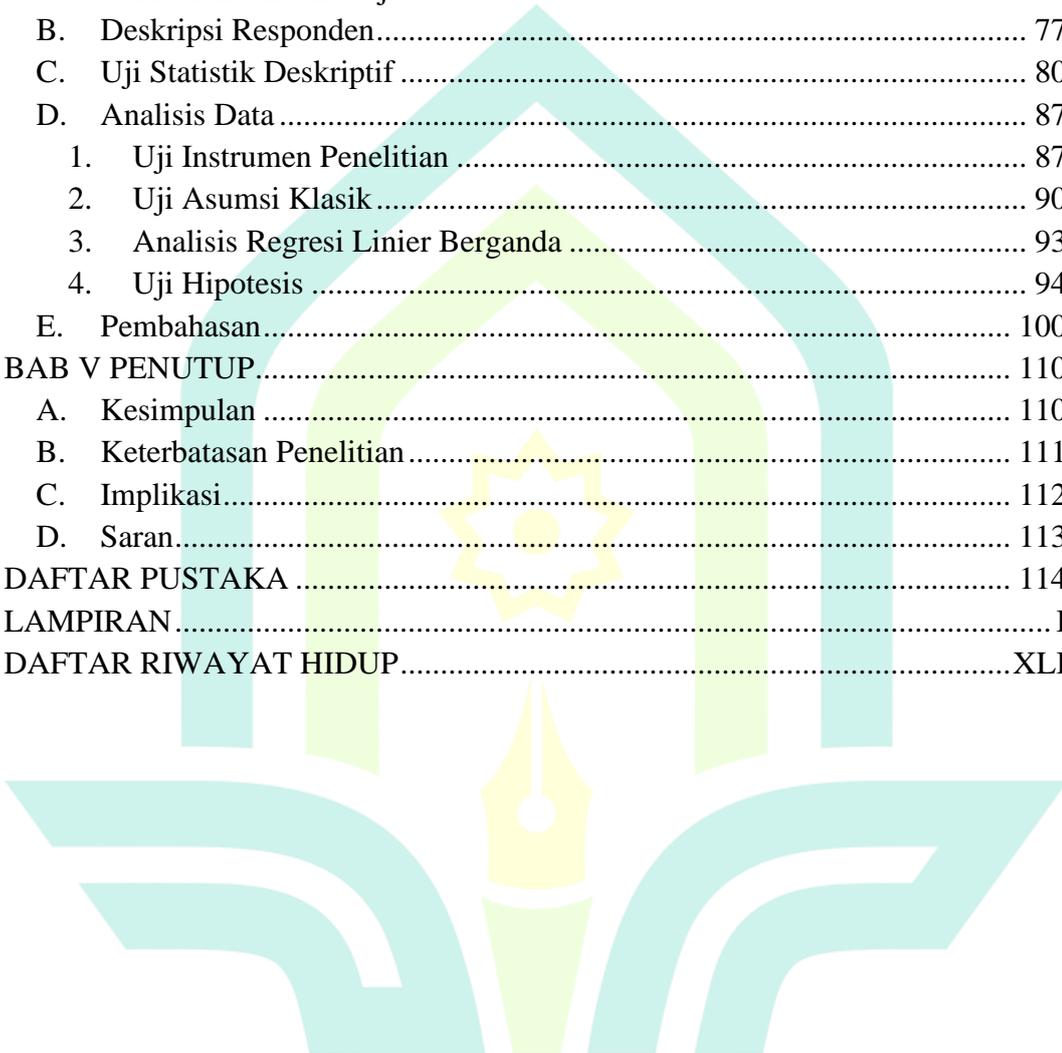


Sukma Purbaningrum

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan	11
D. Manfaat	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	15
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	17
3. Kejelasan Sasaran Anggaran.....	24
4. Pengendalian Akuntansi.....	29
5. Sistem Pelaporan.....	34
B. Telaah Pustaka	39
C. Kerangka Berpikir.....	53
D. Hipotesis.....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	63
B. Setting Penelitian	64
C. Populasi dan Sampel Penelitian	64
D. Variabel Penelitian	65
E. Sumber Data.....	67
F. Teknik Pengumpulan Data.....	67

G. Metode Analisis Data	69
1. Uji Instrumen Penelitian	69
2. Analisis Deskriptif	70
3. Uji Asumsi Klasik	70
4. Analisis Regresi Linear Berganda	72
5. Uji Hipotesis	72
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	75
A. Gambaran Umum Objek	75
B. Deskripsi Responden	77
C. Uji Statistik Deskriptif	80
D. Analisis Data	87
1. Uji Instrumen Penelitian	87
2. Uji Asumsi Klasik	90
3. Analisis Regresi Linier Berganda	93
4. Uji Hipotesis	94
E. Pembahasan	100
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Keterbatasan Penelitian	111
C. Implikasi	112
D. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XLI



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

◌َ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
◌ُ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الأَطْفَالِ رَوْضَةٌ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ al-madīnahal-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- الرَّازِقِينَ خَيْرٌ فَهُوَ اللَّهُ إِنَّ وَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- مُرْسَاهَا وَ مَجْرَاهَا اللَّهُ بِسْمِ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbi l `ālamīn
- الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ Allaāhu gafūrun rahīm
- جَمِيعًا الْأُمُورُ لِلَّهِ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`anv

J. Tajwid

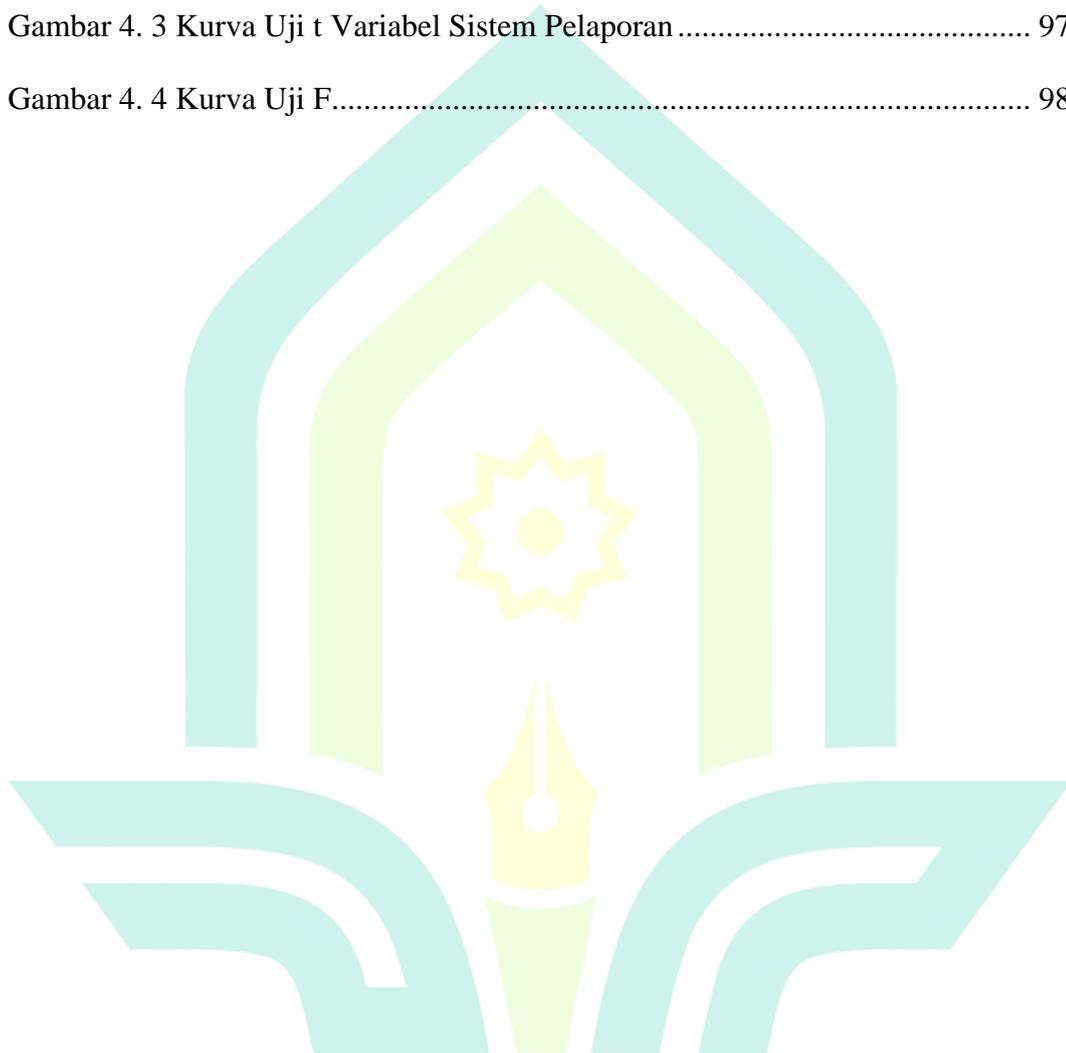
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Nilai SAKIP 2024	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3. 1 Daftar Jumlah Pegawai	64
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel.....	66
Tabel 4. 1 Kualifikasi Kuesioner	78
Tabel 4. 2 Kualifikasi Responden Berdasarkan Umur.....	78
Tabel 4. 3 Kualifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	78
Tabel 4. 4 Kualifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	79
Tabel 4. 5 Kualifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	79
Tabel 4. 6 Deskripsi Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran.....	80
Tabel 4. 7 Deskripsi Variabel Pengendalian Akuntansi.....	82
Tabel 4. 8 Deskripsi Variabel Sistem Pelaporan.....	84
Tabel 4. 9 Deskripsi Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	85
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas.....	88
Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach's	90
Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-smirnov.....	91
Tabel 4. 14 Uji Multikolonieritas dengan metode VIF.....	92
Tabel 4. 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas	93
Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	93
Tabel 4. 17 Hasil Uji t.....	95
Tabel 4. 18 Hasil Uji Simultan (f).....	98
Tabel 4. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	53
Gambar 2. 2 Dokumentasi Penelitian	XL
Gambar 4. 1 Kurva Uji t Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran.....	96
Gambar 4. 2 Kurva Uji t Variabel Pengendalian Akuntansi.....	96
Gambar 4. 3 Kurva Uji t Variabel Sistem Pelaporan.....	97
Gambar 4. 4 Kurva Uji F.....	98



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	I
Lampiran 2 Surat Telah Melaksanakan Penelitian	II
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian.....	III
Lampiran 4 Tabulasi Data Responden	IX
Lampiran 5 Tabel r.....	XVI
Lampiran 6 Tabel t.....	XVII
Lampiran 7 Tabel F.....	XVIII
Lampiran 8 Deskriptif Statistik.....	XIX
Lampiran 9 Uji Validitas.....	XXVIII
Lampiran 10 Uji Reliabilitas.....	XXXIII
Lampiran 11 Uji Normalitas	XXXIV
Lampiran 12 Uji Multikolonieritas	XXXV
Lampiran 13 Uji Heteroskedastisitas	XXXVI
Lampiran 14 Uji t.....	XXXVII
Lampiran 15 Uji f.....	XXXVIII
Lampiran 16 Uji Koefisien Determinasi.....	XXXIX
Lampiran 17 Dokumentasi Penelitian.....	XL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah keberlangsungan era desentralisasi dan otonomi daerah, terdapat tantangan bagi pemerintah daerah yang didesak untuk berinovasi dan meningkatkan pelayanan publik. Desakan ini berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel selaras pada prinsip *good governance*. Satu dari beberapa aspek utama dalam tata kelola ini yakni akuntabilitas kinerja, yang memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran bagi masyarakat dan pemangku keperluan lainnya. Tuntutan publik terhadap pemerintah dalam hal akuntabilitas kinerja semakin kuat seiring dengan meningkatnya kesadaran dan harapan masyarakat mengenai transparansi dan efektivitas pemerintah. Akibatnya, pemerintah harus memiliki akuntabilitas publik agar pemerintahan yang baik dapat tercapai. Seperti yang dikemukakan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 berkenaan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan beban pemerintah untuk menyusun perencanaan kinerja, mengevaluasi kinerja, dan juga menyusun laporan kinerja untuk disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi dalam memberikan tanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan pemerintah ketika melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan sejak awal (Andesta et al., 2024).

Akuntabilitas kinerja yang baik adalah kondisi di mana instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka secara transparan, objektif, dan sesuai dengan mandat yang diberikan. Hal ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan integritas dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Beberapa karakteristik utama dari akuntabilitas kinerja yang baik adalah (1) memberikan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan hasil program yang mudah diakses oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan, (2) proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, (3) mengelola sumber daya secara efisien untuk manfaat yang maksimal, (4) memberlakukan pengawasan untuk mencegah inefisiensi, (5) memberikan kepuasan pada masyarakat atas layanan dan program yang disediakan (IKM). Sebagai elemen krusial dalam menciptakan pemerintahan dengan manajemen yang efektif, efisien, transparan, dan berintegritas, akuntabilitas kinerja tidak hanya terkait dengan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, tetapi juga dalam membangun kepercayaan publik dan mencapai tujuan pembangunan. Kontribusinya sangat luas ke berbagai pihak, dari pemerintah hingga masyarakat dan menjadikannya salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan. Semakin tinggi derajat akuntabilitas akan menandakan baiknya kinerja dari instansi pemerintah, sehingga mudah untuk diidentifikasi elemen apa saja yang dapat membawa pengaruh untuk akuntabilitas kinerja dalam memajukan tata kelola keuangan dan pelayanan publik di tingkat daerah (Sawir, 2022).

Berdasarkan karakteristik tersebut, peneliti memilih untuk menggunakan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan sebagai variabel penelitian. Hal ini dikarenakan kejelasan sasaran anggaran berkaitan untuk mendukung informasi yang transparan terkait rencana dan program pemerintah, serta menghindari terjadinya kesalahan penggunaan anggaran yang akan menghambat efektivitas kinerja instansi. Variabel pengendalian akuntansi menyediakan adanya pengawasan dalam penggunaan anggaran. Sedangkan sistem pelaporan dapat memudahkan akses informasi oleh berbagai pihak dan memastikan bahwa pelaporan yang jelas dapat digunakan untuk evaluasi kinerja. Pada penelitian Prabowo & Bawono (2024) Pengaruh Sistem Pelaporan, Sistem Pengendalian Internal, Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kota Sragen menjelaskan bahwa sistem pelaporan, sistem pengendalian internal, dan motivasi kerja membawa pengaruh secara signifikan kepada akuntabilitas kinerja tetapi anggaran berbasis kinerja tidak berhasil memoderasi hubungan tersebut. Terdapat inkonsistensi pada penelitian tersebut, adanya inkonsistensi penelitian dapat diakibatkan dari pengambilan data atau pengolahan data yang kurang tepat. Seperti pengendalian internal yang masih terlalu luas cakupannya, sehingga peneliti akan memilih pengendalian akuntansi bersama dengan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan. Peneliti akan mengisi inkonsistensi dari hasil penelitian tersebut dengan objek penelitian di BPKAD

Kabupaten Pematang Jaya sebagai perluasan wilayah dengan karakteristik birokrasi dan lingkungan kerja yang berbeda.

Akuntabilitas kinerja telah menjadi prioritas dalam pengelolaan pemerintahan, akan tetapi masih banyak daerah yang menghadapi tantangan dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang baik dalam pemerintah (Febriani, 2023). Laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil evaluasi kinerja instansi sering menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, lemahnya sistem pengendalian internal, serta pelaporan kinerja yang tidak memadai. Kasus korupsi anggaran di berbagai daerah menjadi salah satu cerminan nyata dari lemahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Belum lama di awal tahun ini, di Kabupaten Cirebon, tingkat korupsi anggaran cukup tinggi yang berdampak signifikan pada pelaksanaan program dan proyek pembangunan. Banyak proyek yang terhenti atau tidak selesai sesuai rencana karena terjadi penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik oleh oknum-oknum yang tidak memenuhi tanggung jawab. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan yang seharusnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, sekaligus menegaskan pentingnya penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja (Badan Pengawas Keuangan, 2025).

Tabel 1. 1
Nilai SAKIP 2024

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
1	BPKAD Kota Pekalongan	84,50	B
2	BPKAD Kabupaten Brebes	80,01-90,00	BB
3	BPKAD Kabupaten Pekalongan	70,00	A
4	BPKAD Kabupaten Pemasang	64,15	A

(sumber: website resmi BPKAD kabupaten dan kota)

Pada tabel 1.1 menunjukkan perbandingan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di empat wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan data tersebut, BPKAD Kota Pekalongan memperoleh nilai tertinggi sebesar 84,50 dengan predikat A, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik. Disusul oleh BPKAD Kabupaten Brebes yang juga meraih predikat A dengan rentang nilai antara 80,01 hingga 90,00. Sementara itu, BPKAD Kabupaten Pekalongan memperoleh nilai 70,00 dengan predikat BB, yang menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitasnya sudah baik namun masih memiliki ruang untuk perbaikan. Adapun BPKAD Kabupaten Pemasang memperoleh nilai paling rendah dibandingkan daerah lainnya, yaitu sebesar 64,15 dengan predikat B. Perolehan nilai ini menjadi perhatian khusus dalam penelitian, mengingat pentingnya akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab.

Penilaian Standar Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah (SAKIP) BPKAD Kabupaten Pemasang tahun 2024 memperoleh nilai 64,15 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 63,25 kategori baik dengan predikat "B". Meskipun beberapa tahun terakhir terus mengalami sedikit demi sedikit peningkatan, nilai tersebut masih terpaut jauh jika

dibandingkan dengan nilai SAKIP yang diperoleh oleh Kabupaten Banyumas yang mendapatkan nilai 80,53 dengan predikat A (Banyumas, 2023). Sehingga masih harus terus diupayakan peningkatan SAKIP pada BPKAD Kabupaten Pemalang ini, hasil perolehan nilai dapat disebabkan oleh beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan sebagai hasil dari evaluasi kinerja, seperti adanya kendala dari IKDP terkait program RPJMD 2021-2026 tidak sesuai dengan RKPD 2023, nomenklatur program dan nominal program tidak sesuai antara RKPD 2023 dengan KUA PPAS 2023, dan nomenklatur program dan nominal program tidak sesuai antara KUA PPAS 2023 dengan APBD. Target output pada kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) yang terealisasi sebesar 65% yakni berhasil memproses 911 laporan dari total 2001 juga didapati masalah seperti banyaknya tanah yang dikuasai pemerintah daerah beririsan dengan tanah masyarakat atau lembaga lain, dikuasai pemerintah daerah tetapi tanpa dokumen yang diperlukan untuk memproses sertifikat, dan masih terdapat berkas-berkas pengajuan sertifikat tanah yang diajukan BPN yang belum diproses dan masih perlu klarifikasi dan pengukuran ulang. Sistem pelaporan yang diterapkan belum sepenuhnya memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas, bisa diketahui dari informasi yang disampaikan kepada publik kurang lengkap dan kurang tepat waktu. Hal ini juga sebagai akibat dari sistem pelaporan yang belum menggunakan aplikasi sehingga pelaporan manual akan memakan waktu yang lebih lama (BPKAD Kabupaten Pemalang, 2025).

Ketika sasaran anggaran dilaksanakan dengan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART), maka setiap unit kerja memiliki

acuan yang jelas dalam menjalankan kegiatan atau program (Ariyandani et al., 2023). Oleh E. P. P. Purba & Kusmilawaty, (2024) didapati bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa dokumen anggaran cenderung menyajikan sasaran secara umum dan deskriptif, tanpa menyertakan indikator yang spesifik, terukur, realistis, maupun berbasis waktu sebagaimana prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound). Hal ini mengakibatkan tujuan organisasi menjadi kabur, serta menyulitkan pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap akuntabilitas pelaksanaannya. Ketiadaan parameter yang jelas dalam dokumen anggaran pada akhirnya berpotensi menimbulkan perilaku moral hazard dari agen, karena tidak adanya tolok ukur kinerja yang objektif yang bisa digunakan oleh prinsipal (masyarakat atau otoritas pengawas) untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut (research gap) dengan memberikan bukti empiris bahwa kejelasan sasaran anggaran yang disusun secara terstruktur dan terukur berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengendalian akuntansi menjadi bagian penting dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikarenakan sistem pengendalian akuntansi yang diterapkan dengan baik menentukan bahwa tiap-tiap transaksi keuangan dicatat, dilaporkan, dan diawasi secara benar sesuai standar yang berlaku (Mulya & Fauzihardani, 2022). Hasil dari penelitian Hafzhan, (2021) yang menemukan bahwa pengendalian akuntansi memberikan pengaruh pada

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Meskipun demikian, penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi pada sektor publik belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam aspek dokumentasi transaksi, pemisahan fungsi, serta pelaksanaan prosedur pencatatan yang sesuai standar. Dalam studinya, ditemukan bahwa masih banyak instansi pemerintah yang menjalankan pengendalian hanya sebagai formalitas, bukan sebagai alat kontrol internal yang sesungguhnya. Hal ini berimplikasi terhadap lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pencatatan transaksi, yang pada akhirnya berdampak pada akuntabilitas pelaporan keuangan dan kinerja instansi. Hafzhan juga mencatat bahwa kelemahan dalam pengendalian akuntansi dapat membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran, manipulasi data keuangan, serta menghambat proses audit yang andal. Oleh karena itu, dalam konteks teori agensi, pengendalian akuntansi seharusnya menjadi salah satu mekanisme yang memperkuat hubungan antara prinsipal dan agen melalui pengawasan yang sistematis dan terdokumentasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mencoba memperluas cakupan dengan menguji secara empiris sejauh mana pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya pada BPKAD Kabupaten Pematang Jaya.

Sistem pelaporan berfungsi menjadi saluran untuk menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu mengenai penggunaan sumber daya, pelaksanaan program, dan pencapaian hasil. Melalui laporan yang transparan dan terperinci, instansi pemerintah dapat menunjukkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa setiap anggaran yang

dikelompokkan telah dipakai selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan (Budiani & Asyik, 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh Risandini et al., (2024) membuktikan bahwa system pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun menunjukkan bahwa sistem pelaporan di sektor publik masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek ketepatan waktu, keakuratan informasi, dan kualitas data yang disampaikan. Studi tersebut menemukan bahwa di beberapa instansi, laporan keuangan disusun semata-mata untuk memenuhi kewajiban administratif, bukan sebagai alat akuntabilitas yang menyajikan informasi transparan dan dapat digunakan untuk evaluasi kinerja. Selain itu, pelaporan yang lambat dan kurang informatif dapat mempersulit pengambilan keputusan serta mengaburkan posisi keuangan instansi. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa lemahnya sistem pelaporan turut berkontribusi terhadap rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan bukan hanya menjadi saluran komunikasi keuangan, tetapi juga sebagai refleksi dari integritas dan kinerja organisasi. Dalam kerangka teori agensi, sistem pelaporan yang andal membantu mengurangi informasi yang asimetris antara prinsipal dan agen, serta menjadi dasar penilaian yang objektif atas kinerja. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk menguji secara empiris bagaimana sistem pelaporan yang baik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya di lingkungan BPKAD Kabupaten Pematang Jaya.

Apabila di Kabupaten Pemalang terjadi pengelolaan anggaran secara tidak nyata, pengendalian akuntansi yang lemah, dan sistem pelaporan yang tidak memadai dapat mengarah pada penyalahgunaan dana dan ketidakjelasan hasil yang dicapai. Penelitian ini sangat relevan untuk mengidentifikasi bagaimana kejelasan sasaran anggaran dapat memastikan alokasi dana yang tepat sasaran, serta bagaimana pengendalian akuntansi yang baik dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan dana. Selain itu, sistem pelaporan yang efektif sangat penting dalam menyampaikan informasi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan berkenaan dengan pemakaian anggaran dan pencapaian hasil, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini dinantikan agar memberikan rekomendasi untuk memajukan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pemalang untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan ini, peneliti akan melakukan penelitian terkait bagaimana kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan adanya kesenjangan penelitian terdahulu, maka penulis hendak melangsungkan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada BPKAD Kabupaten Pemalang)”**.

B. Rumusan Masalah

Beralaskan pembahasan dalam latar belakang, perumusan masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BPKAD Kabupaten Pemalang?
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BPKAD Kabupaten Pemalang?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BPKAD Kabupaten Pemalang?
4. Apakah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BPKAD Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan

Beralaskan rumusan masalah, kemudian penelitian yang dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKAD Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menganalisis Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada BPKAD Kabupaten Pemalang.
3. Untuk menganalisis Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada BPKAD Kabupaten Pemalang.

4. Untuk menganalisis Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKAD Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat

Beralaskan tujuan, manfaat yang dinantikan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pelengkap maupun pembanding dari hasil penelitian-penelitian terdahulu serta referensi tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di BPKAD Kabupaten Pemalang.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktisi untuk berbagai pihak, diantaranya:

- a. Untuk peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di BPKAD Kabupaten Pemalang.
- b. Untuk BPKAD Kabupaten Pemalang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran akan pentingnya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan pada

akuntabilitas kinerja bagi pemerintah bagi BPKAD Kabupaten Pematang.

- c. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi, wawasan, informasi bagi peneliti yang lain dengan penelitian yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Susunan yang dirancang dalam kajian ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berhaluan membagikan wawasan kepada pembaca terkait kondisi dan juga lingkungan penelitian. Beragam keadaan diantaranya adalah mengapa topik penelitian tersebut diambil, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang akan diberikan.

BAB II LANDASAN TEORI

Penyusunan landasan teori berguna untuk menyuguhkan pengetahuan yang terperinci berkenaan dengan kajian dahulu yang sesuai pada pokok bahasan penelitian. Dengan ini landasan konseptual yang disajikan pada penelitian ini bisa menunjang pembaca untuk mengerti kerangka pemikiran yang dipakai.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian metodologi penelitian berisi proses yang nantinya diterapkan dalam penelitian. Proses tersebut meliputi rancangan penelitian, populasi,

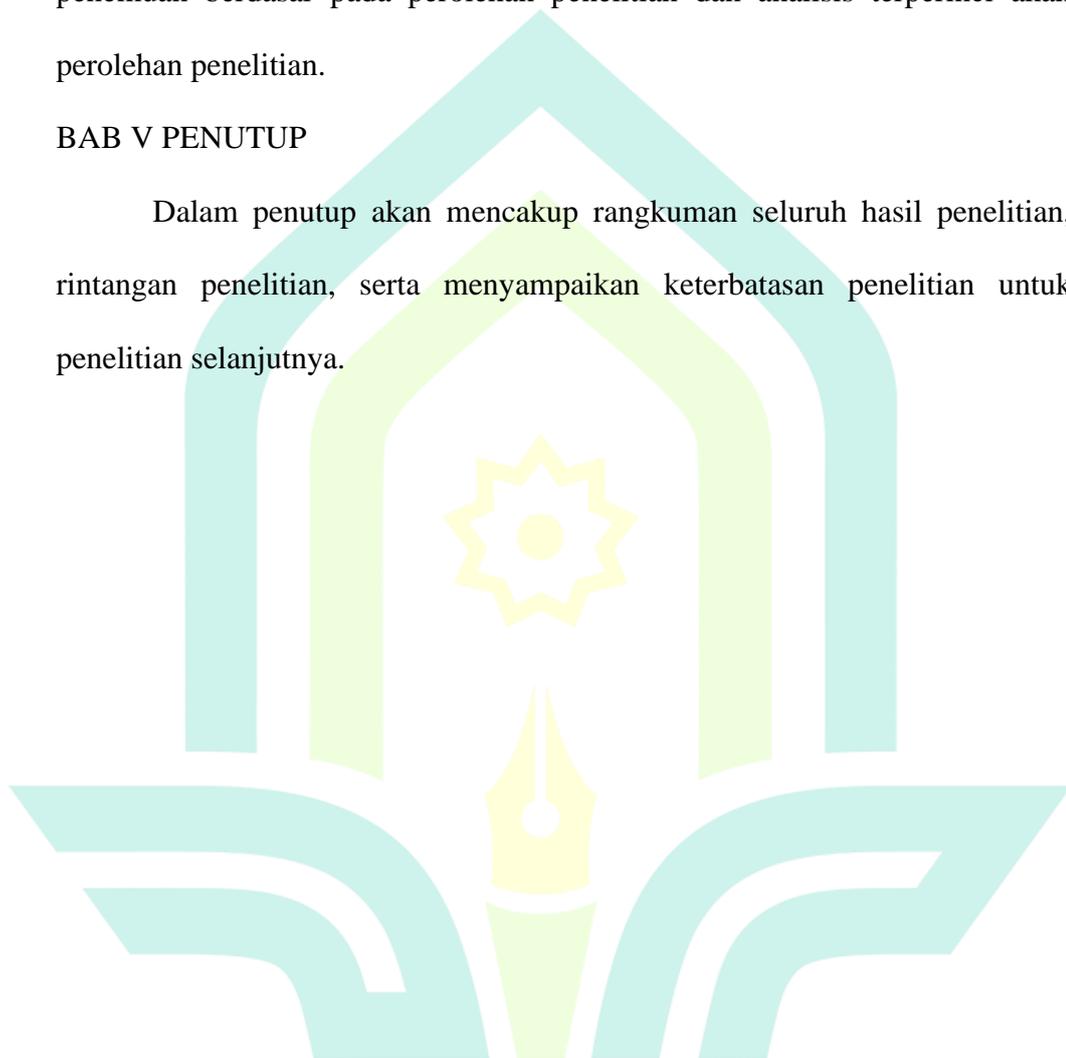
sampel, teknik pemilihan sampel, definisi operasional, teknik pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan ialah penggalan yang menelaah penemuan berdasar pada perolehan penelitian dan analisis terperinci akan perolehan penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam penutup akan mencakup rangkuman seluruh hasil penelitian, rintangan penelitian, serta menyampaikan keterbatasan penelitian untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara parsial kejelasan sasaran anggaran membawa pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan apabila sasaran anggaran yang ditetapkan semakin jelas, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini selaras dengan teori agensi, di mana kejelasan tujuan dapat meminimalisir konflik kepentingan antara pihak agen dan pihak prinsipal.
2. Secara parsial pengendalian akuntansi membawa pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengendalian akuntansi yang baik akan membantu dalam memantau serta mengevaluasi kegiatan operasional dan keuangan, sehingga menciptakan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini juga sesuai dengan teori agensi, di mana mekanisme kontrol seperti pengendalian akuntansi berfungsi sebagai alat untuk mengawasi dan menekan perilaku oportunistik agen.
3. Secara parsial sistem pelaporan membawa pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan yang efektif menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan proses evaluasi kinerja secara objektif. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaporan yang baik memperkuat hubungan

antara agen dan prinsipal dengan memberikan transparansi atas hasil kinerja yang telah dicapai.

4. Secara simultan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan membawa pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya ketiga elemen ini secara simultan, maka risiko asimetri informasi, penyimpangan tugas, dan moral hazard dapat ditekan, sehingga kinerja yang dicapai pun menjadi lebih akuntabel.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya:

1. Ruang lingkup objek penelitian terbatas pada satu instansi, yaitu BPKAD Kabupaten Pematang Jaya, sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan ke instansi pemerintah lainnya dengan karakteristik organisasi dan tata kelola yang berbeda.
2. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, yang mengandalkan persepsi subjektif responden. Hal ini dapat memunculkan bias respon, seperti kecenderungan untuk menjawab secara normatif atau tidak mencerminkan kondisi aktual.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, sementara akuntabilitas kinerja dalam sektor publik sangat dimungkinkan dapat dipengaruhi juga oleh berbagai faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa implikasi dari penelitian ini yang penting untuk dipahami, diantaranya implikasi teoritis dan implikasi praktis.

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam kerangka teori agensi. Teori agensi menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan mandat (prinsipal) dan pihak yang menerima mandat untuk melaksanakannya (agen). Dalam konteks sektor publik, pejabat atau pegawai pemerintah bertindak sebagai agen, sementara masyarakat bertindak sebagai prinsipal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan merupakan mekanisme pengawasan yang efektif yang dapat digunakan oleh prinsipal untuk mengontrol tindakan agen. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa penerapan mekanisme formal yang tepat dapat menekan konflik kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah..

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh pemerintah daerah, khususnya BPKAD Kabupaten Pematang Jaya, dalam menyusun kebijakan dan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemerintah daerah perlu memperkuat aspek perencanaan dengan merumuskan sasaran anggaran yang spesifik, terukur, dan realistis. Di sisi lain, pengendalian akuntansi harus dioptimalkan agar dapat mendeteksi

kesalahan atau penyimpangan secara dini. Selain itu, sistem pelaporan yang digunakan perlu didesain agar menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Implementasi dari ketiga aspek tersebut secara terintegrasi dapat membantu meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di daerah.

D. Saran

Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar memperluas cakupan objek penelitian pada instansi pemerintah lainnya, baik di kabupaten/kota lain maupun lintas provinsi, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi secara lebih luas. Selain itu, peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini seperti komitmen organisasi, integritas individu, atau budaya organisasi, yang kemungkinan juga berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Metode pengumpulan data juga dapat diperkaya dengan teknik wawancara atau studi dokumen untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A. M. N., & Rahayu, A. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 311–320. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/1334>
- Andesta, R., Rosmanidar, E., & Budianto, A. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Keuangan Dan Manajemen Akuntansi*, 06(1), 19–27. <https://doi.org/https://journalpedia.com/1/index.php/jkma>
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150–159. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.454>
- Ariyandani, N., Chalid, L., & Umar, N. A. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja. *10(1)*, 35–43.
- Arwani, A. (2024). *Grand Theory: Esensi Ilmu Sosial dan Ekonomi* (S. R. Utari (ed.)). Eureka Media Aksara.
- Asrulla, A. S., & Wulandari, N. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Studi Kebijakan Publik*. Prenada Media.
- Badan Pengawas Keuangan. (2025). *Badan Pengawas Keuangan*. <https://bpkcirebon.id/tag/penyelewengan-dana-publik-cirebon/>
- Banyumas, P. K. (2023). *Kabupaten Banyumas Satu-satunya Kabupaten Peraih SAKIP Nilai “A” di Jateng*.
- BPKAD Kabupaten Pematang. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022*.
- Budiani, L. V., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–20. www.surabaya.go.id
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3, 5423–5443.
- Ditjen Perkeretaapian. (2023). *Pedoman Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi*

Pemerintah. In *Pedoman SAKIP*.

- Fadila, S. N., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten sidoarjo. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 1, 231–237.
- Febriani, D. (2023). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo)*. Universitas Medan Area.
- Hafzhan, M. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>
- Hasanah, A. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hawalya, N. (2023). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros*. Universitas Bosowa Makasar.
- Hawalya, N., Remmang, H., & Faridah. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. *JOURNAL OF ACCOUNTING, FINANCE AND SHARIA ACCOUNTING (ACCESS)*, 3(1), 111–118. <https://doi.org/10.70178/icbrj.v2i2.61>
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *METODE PENELITIAN* (M. Pradana (ed.); Issue July). Eureka Media Aksara.
- Imbaruddin, A. (2024). *Kinerja Organisasi Publik: Akuntabilitas, Kompetisi, Organisasi, SDM* (S. A. Majid (ed.); 1st ed.). Deepublish.
- Isnanto, Y., Suharno, & Bambang Widarno. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15, 489–501.

- Loppies, F., Gasperz, J., & Limba, F. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Manajemen Indonesia (JKEMI)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61079/jkemi.v1i1.10>
- Machali, I. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*.
- Majid, J. (2022). *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Perspektif Islam* (M. Awaluddin (ed.)). CV. Diva Pustaka.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); I). ANDI.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Alometrik Kenari Muda). *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Martias, L. D. (2021). Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 40. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>
- Maulidya, P. D., & Azmi, I. N. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 7207–7220. <https://doi.org/10.70178/icbrj.v2i2.61>
- Miftahul Janna, N., & Herianto. (2021). *Konsep Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/v9j52>
- Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 192–212. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.463>
- Ningsih, S., & Dukalang, H. (2019). Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analisis Regresi Linier Berganda. *Jambura Journal of Mathematics*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.34312/jjom.v1i1.1742>
- Nuryaman, & Christina, V. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis* (R. Sikumbang (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Prabowo, M. S., & Bawono, A. D. B. (2024). *Pengaruh Sistem Pelaporan, Sistem Pengendalian Internal, Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja*

Instansi Pemerintahan Dengan Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kota Sragen. 1–16.

- Pranatawijaya, V. H., Widiatry, W., Priskila, R., & Putra, P. B. A. A. (2019). Penerapan Skala Likert dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 5(2), 128–137. <https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185>
- Purba, E. P. P., & Kusmilawaty. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. *Akuntansi*, 3(1), 304–319. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v3i1.1490>
- Purwanto, M. (2024). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.* STIE Bank BPD Jateng.
- Ramadhani, F. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara.* Universitas Medan Area.
- Reza Viola, I., Andriana, A., & Wardhaningrum, O. A. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(1), 92–102. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i1.191>
- Risandini, T., Prayogo, Y., & Ifazah, L. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 4(1), 79–95. <https://doi.org/10.30631/jisacc.v4i1.2311>
- Safitri, N. H. (2020). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupa. UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.*
- Samsiyah, R. D., Suharno, & Widarno, B. (2022). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN KOMPETENSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(4). <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i4.6235>

- Saratian, E. T. P. (2025). *Manajemen Strategik : Grand Theory dan Implikasi Praktis* (F. M. Viruliana (ed.); Issue January). CV Angkasa Media Literasi.
- Sawir, M. (2022). Konsep Akuntabilitas Publik. *Publikasi Jurnal*, 1–27.
- Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN (Teori dan Praktik)* (B. Ismaya (ed.); P). CV Saba Jaya Publisher.
- Sindi, S. (2023). *Pengaruh Pengembangan Karir, Employee Engagement, Budaya Organisasi dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. PUSTAKABARUPRESS.
- Syarif, F. J., Suwandi, M., & Sari, N. R. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dengan Pengendalian Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 133–151. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29262>
- Taber, K. S. (2018). The Use of Cronbach's Alpha When Developing and Reporting Research Instruments in Science Education. *Research in Science Education*, 48(6), 1273–1296. <https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2>
- Uropmabin, M. (2024). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang)*. STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta.
- Usmadi, U. (2020). Pengujian Persyaratan Analisis (Uji Homogenitas Dan Uji Normalitas). *Inovasi Pendidikan*, 7(1), 50–62. <https://doi.org/10.31869/ip.v7i1.2281>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Widaryati. (2020). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 32, 376–390. <https://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>